

ETNOREFLIKA

VOLUME 6

No. 3. Oktober 2017

Halaman 183 - 200

PROFIL ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG (E-WARONG) KUBE PKH SEBAGAI ALTERNATIF PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA¹*Akhmad Marhadi²***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi profil e-Warong KUBE PKH sebagai alternatif penanggulangan kemiskinan di provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa *Focus Group Discussion* (FGD), observasi lapangan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) 25 e warong KUBE PKH di Provinsi Sulawesi tenggara belum berfungsi secara optimal. E-Warong umumnya hanya berfungsi sebagai tempat menjual bahan pangan pokok saja, tetapi fungsi lainnya belum berjalan optimal sebagaimana amanah Permensos Nomor 25 tahun 2016; b) semua e-Warong telah memenuhi syarat pembentukan yang diamanahkan Permensos tersebut; c) Penggunaan EDC hanya dapat dilakukan oleh 12 e-Warong di Kota Bau-Bau; d) semua e-Warong memiliki karakteristik keanggotaan yang telah sesuai Permensos. Namun demikian tidak semua anggota e-Warong memiliki keterampilan yang dapat mendukung pengelolaan dan pengembangan KUBE jasa ini; e) semua e-Warong di Kota Bau-Bau menggunakan dana BPSU dan dana bantuan KUBE sesuai peruntukannya. Sedangkan penggunaan dana tersebut oleh e-Warong di Kota Kendari belum optimal; f) pasokan bahan pangan pokok yang disediakan oleh e-Warong saat ini umumnya mereka peroleh dari *supplier* non bulog, yakni dari toko-toko bahan pangan grosir yang banyak ditemukan di Kota Bau-Bau dan Kota Kendari; dan g) semua e-Warong belum dapat melayani pencairan dana bantuan sosial secara non tunai.

Kata kunci: e-warong KUBE PKH, penanggulangan, kemiskinan

ABSTRACT

This research aims at indentifying the profile of e-Warong KUBE PKH as an alternative on poverty alleviation in Southeast Sulawesi. This research uses descriptive qualitative approach, and uses Focus Group Discussion, field observation and in depth interview as techniques of data collection. The results show that: a) 25 e warong KUBE PKH in Southeast Sulawesi province doesn't have optimal function. Generally, E-Warong only serves as a place to sell staple food only, but other functions have not run optimally as mandate of Social Minister Regulation Number 25 of 2016; b) all e-Warong has fulfilled the requirements of the establishment of the Social Minister Regulation; c) The use of EDC can only be done by 12 e-Warong in Bau-Bau City; d) all e-Warong have membership characteristics that have been accorded with Social Minister regulation; e) the whole e-Warong in Baubau city uses BPSU funds and KUBE grants according to their allocation. While the use of funds by e-Warong in Kendari City has not been optimal; f) the basic supply of food is supplied by e-Warong is now generally obtained from non-bulog suppliers, from wholesale grocery stores found in Bau-Bau and Kendari municipalities; and g) all e-Warong has not been able to serve the disbursement of non-cash social assistance funds.

Keywords: e-Warong KUBE PKH, alleviation, alleviation

¹ Hasil penelitian

² Dosen pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma Anounouhou Kendari, Pos-el: ajie_np@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan perkara yang tidak pernah habis untuk dibahas di Indonesia. Hal tersebut tentu saja didasari fakta bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Setiap rezim pemerintahan juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengangkat masyarakat miskin agar mampu hidup layak. Beberapa program penanggulangan kemiskinan merupakan perbaikan dan pengembangan dari program penanggulangan kemiskinan yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya. Pada era Kabinet Kerja, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas, dari 9 (sembilan) agenda utama (nawacita) yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan periode 2015-2019, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowi di tahun 2014 mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Dalam amanah Peraturan Perundang-undangan tersebut, disebutkan bahwa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah menetapkan Program Perlindungan Sosial, yang meliputi Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Dalam operasionalnya, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan baik ditingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota yang juga melibatkan berbagai pihak.

Dalam perkembangannya, program tersebut serta program-program penanggulangan kemiskinan lainnya mengalami perkembangan yang signifikan. Terdapat berbagai program penanggulangan yang diinisiasi oleh pemerintah, dan ada pula program warisan yang tinggalkan dari masa pemerintahan sebelumnya. Program-program

tersebut dikembangkan atau diperluas cakupannya seperti program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dalam Bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Rastra (Raskin), Bantuan Sarana Lingkungan bagi Fakir Miskin, dan sebagainya.

Salah satu program utama penanggulangan kemiskinan yang terus diperluas cakupan manfaatnya adalah Program Keluarga Harapan. Program ini bertujuan: (a) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; (b) meningkatkan taraf pendidikan anak KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH; (c) meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil/menyusui serta anak di bawah usia 6 tahun, dan (d) meningkatkan kondisi ekonomi KPM (Marwardi, dkk, 2017:2).

Program ini telah berjalan selama 9 (sembilan) tahun, namun di lapangan masih dijumpai berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satunya laporan BPK (2013) yang menemukan beberapa permasalahan seperti: (a) komitmen Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam mendukung PKH masih kurang; (b) proses validasi sasaran tidak selalu mengikuti ketentuan, sehingga hasil validasi tidak lengkap; (c) proses verifikasi atas komitmen peserta PKH terhadap kesehatan dan pendidikan belum optimal; (d) kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) seringkali berubah sehingga pembayaran bantuan menjadi kurang efektif, dan (e) *monitoring* rutin/berkala dan evaluasi belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum.

Untuk menghindari munculnya permasalahan tersebut di masa mendatang, maka pada tahun 2016, Presiden mengeluarkan arahan kepada seluruh jajaran menteri: (a) pentingnya mewujudkan sistem finansial nasional yang inklusif; (b) penyaluran semua bantuan sosial dan subsidi secara non tunai dengan menggunakan

sistem perbankan untuk memudahkan kontrol dan pemantauan serta mengurangi penyimpangan; (c) perlunya mengintegrasikan penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos menjadi satu kartu. Tindak lanjut atas arahan tersebut direspon oleh Kemensos yang mengarahkan jajarannya untuk melakukan beberapa hal, yakni: (a) semua program penanganan kemiskinan perlu disinergikan agar *outcome*-nya memberikan dampak luas, efisien, dan efektif; (b) perlu dilakukan pemberdayaan pendamping PKH dan masyarakat yang menjadi dampingannya dan menjadikan mereka sebagai pelaku dalam sistem keuangan inklusif; dan (c) proses penanganan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus holistik, mulai dari pembentukan, pengorganisasian, sampai pada pemasaran hasil usahanya (Mawardi, dkk, 2017).

Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, kementerian Sosial selanjutnya menginisiasi beberapa program bantuan sosial non tunai untuk menyalurkan bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selama ini disalurkan secara tunai. Salah satu operasionalnya adalah melalui Program Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha bersama Program Keluarga Harapan atau yang lebih dikenal dengan nama e-Warong KUBE-PKH.

Pada tahun 2016, Kemensos telah berhasil meresmikan 108 unit e-Warong KUBE PKH di 35 kota/kabupaten dan pada tahun 2017, Kemensos berencana membuka 3.500 unit e-Warong yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, eksistensi e-Warong KUBE di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri baru dapat difasilitasi pembentukannya di 2 (dua) wilayah, yakni Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Namun demikian, dalam proses transaksi, belum dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik secara merata. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh e-Warong KUBE di daerah lainnya di Indonesia yang relatif sudah lebih mapan.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara serta Dinas Sosial Kota Kendari dan Kota Bau – Bau telah berhasil memfasilitasi pembentukan 25 e-Warong KUBE PKH, yakni 12 unit di Kota Bau-Bau dan 13 unit di Kota Kendari. Kendati telah dibentuk sejak tahun 2016, namun demikian, geliat pengelolaannya tampaknya tidak berjalan secara optimal, baik ditinjau dari aspek keorganisasian, keanggotaan, pelaksanaan fungsi, penggunaan perangkat utama berupa Electronic Data Capture (EDC), penggunaan dana BPSU dan dana bantuan KUBE, serta pasokan (*supply*) barang.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan profil pengelolaan Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga akan tampak gambaran mengenai potensi pengembangan e-Warong KUBE PKH di daerah ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam serta pemahaman yang holistik berdasarkan situasi yang wajar (*natural setting*) dari kasus yang akan diteliti, dan peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen kunci untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menjawab kebutuhan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi 2 (dua) wilayah, yakni Kota Bau-Bau dan Kota Kendari. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah bahwa hingga bulan september 2017, dari 10 (sepuluh) wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya pemerintah daerah pada 2 (dua) wilayah tersebut yang mampu memfasilitasi terbentuknya e-Warong KUBE PKH.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pejabat dalam lingkup Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kota Kendari, dan Pemerintah Kota Bau-Bau, yakni Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Sosial Kota Kendari, dan Dinas Sosial Kota Bau-Bau, Unit Pelaksana (UP)-PKH Koordinator Pendamping PKH tingkat kota, aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari dan Kota Bau-Bau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Bappeda Kota Kendari, dan Bappeda Kota Bau-Bau. Selain itu, unit analisis penelitian ini mencakup beberapa institusi terkait lainnya, seperti Divisi Regional Bulog, Kantor Cabang BNI dan BRI, Pendamping PKH, Supervisor/penyelia e-Warong, Pengurus KUBE Jasa/Operator e-Warong, KPM PKH Penerima KKS dan non penerima KKS, Masyarakat miskin non PKH, pemilik warung tradisional disekitar lokasi e-Warong dan masyarakat sekitar lainnya. Informan sebagai unit analisis ditentukan berdasarkan tujuan (*purposive*), yaitu informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus kajian dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data di lapangan, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sekunder berupa dokumen, laporan, profil unit analisis, dan data-data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam analisis kualitatif, langkah-langkah analisis yang digunakan untuk memahami komponen-komponen data adalah melalui; (a) reduksi data, (b) penyajian data, dan (c) menarik kesimpulan/verifikasi (Milles dan Huberman, 2009).

Reduksi data dimaksudkan untuk menata data agar menjadi lebih ringkas, terstruktur, dan sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik reduksi data ini meliputi tahapan perangkuman data (*data summary*), pengkodean (*coding*), merumuskan tema-tema, pengelompokan (*clustering*), dan penyajian cerita secara tertulis. Penyajian data merupakan bagian kedua dari tahap analisis yang terdiri dari langkah-langkah penyusunan ringkasan terstruktur dan deskripsi singkat. Tahap ketiga berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Pengelola E-Warong KUBE PKH di Provinsi Sulawesi Tenggara

E-Warong KUBE PKH merupakan sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE. Program ini merupakan penggabungan beberapa program penanggulangan kemiskinan berorientasi pada pemberian bantuan sosial yang selama ini diinisiasi oleh Kementerian Sosial seperti Program kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan atau (PKH). KUBE itu sendiri merupakan kelompok usaha keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam perkembangannya KUBE selanjutnya terdiri dari dua bentuk, yakni KUBE produksi dan KUBE Jasa. Kegiatan utama KUBE produksi adalah amenguaabn bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Dengan kata lain dalam proses pengelolaan usahanya melibatkan aktivitas produksi didalamnya. Sedangkan KUBE Jasa lebih fokus pada usaha perdagangan dan layanan ja-

sa lainnya. Selanjutnya e-Warong KUBE PKH dikategorikan ke dalam KUBE Jasa.

Berdasarkan hasil penelitian ini, teridentifikasi beragam rupa fisik dan pengelolaan e-Warong KUBE PKH di Provinsi Sulawesi Tenggara. Analisis terhadap kondisi e-Warong KUBE PKH di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Kota Kendari dan Kota Bau-Bau akan diuraikan dalam bagian berikut. Pedoman analisis yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial menteri Sosial tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka ada beberapa aspek yang mendapat perhatian penting dalam penelitian ini, antara lain berkaitan dengan beberapa indikator berikut, yakni: a) Keorganisasian; b) fungsi e-Warong KUBE PKH; c) Kriteria Pembentukan e-Warong; d) penggunaan Alat *Electronic Data Capture* (EDC)/Alat Gesek Transaksi Non Tunai; e) keanggotaan; f) Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) dan Dana Bantuan KUBE; g) *supply* (pasokan barang); h) jenis kegiatan yang dilakukan e-Warong KUBE PKH; i) hak dan kewajiban Pengelola (Anggota) e-Warong KUBE PKH; j) sumber dana pengelolaan e-Warong; k) proses sosialisasi penyelenggaraan program e-Warong KUBE PKH; l) pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan e-Warong KUBE PKH; pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev); m) penyusunan laporan keuangan pengelolaan e-Warong KUBE PKH; dan n) pendampingan oleh Penyelia/Supervisor.

Secara keseluruhan, jumlah e-Warong KUBE PKH yang telah dibentuk dan mulai beroperasi di Kota Bau-Bau adalah sebanyak 12 unit, yakni 12 unit e-Warong di Kota Kendari dan 13 Unit e-Warong KUBE PKH di Kota Bau-Bau. Hal tersebut tampak dalam tabel berikut:

Tabel 1. Lokasi e-Warong di Sulawesi Tenggara Berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan

No	Nama KUBE	Kelurahan	Kecamatan
Kota Bau-Bau			
1	Kalampa	Katobengke	Betoambari
2	Wakaaka	Melai	Murhum
3	Flamboyan	Nganganaumala	Batupoaro
4	Bakti Praja	Bukit Wolio Indah	Wolio
5	Wamose	Kaisabu Baru	Sorawolio
6	Harapan	Waruruma	Kokalukuna
7	Makmur Berkah	Liabuku	Bungi
8	Kalia-Lia Jaya	Kalia-Lia	Lea-Lea
9	BPSU Tapanabatu	Wangkanapi	Wolio
10	BPSU Al-Ikhlas	Sukanayo	Kokalukuna
11	BPSU Labuantae	Waborobo	Betoambari
12	BPSU Barakati	Tarafu	Batupoaro
Kota Kendari			
1	Barakati	Anggoeya	Poasia
2	Wekoila	Bende	Kadia
3	Karunia	Alolama	Mandongga
4	Tunas Mandiri	Lepo-Lepo	Baruga
5	Momahe	Bonggoeya	Wua-Wua
6	Madu	Mangga Dua	Kendari
7	Sejahtera Bersama	Kambu	Kambu
8	Barakati Sejahtera I	Watulondo	Puwatu
9	Malahayati	Lapulu	Abeli
10	Mangrove Wisata	Bungkutoko	Abeli
11	Bersama	Kemaraya	Kemaraya
12	Meambo	Puwatu	Puwatu
13	Mepokoaso	Labibia	Mandongga

Sumber: Data primer, 2017

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa KUBE Jasa berbasis e-Warong di Kota Bau-Bau berjumlah 12 unit. Delapan unit pertama diusulkan pada bulan Februari, yakni KUBE Kalampa, KUBE Wakaaka, KUBE flamboyan, KUBE Bakti Praja, KUBE Wambose, KUBE Harapan, KUBE makmur Berkah, KUBE Kalia-Lia Jaya. Sedangkan empat KUBE lainnya dibentuk dan ditetapkan Dinas Sosial Kota Bau-Bau pada bulan Juni 2017. Sedangkan di Kota Kendari telah terbentuk 13 e-Warong KUBE PKH yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kota Kendari.

Data di atas juga menunjukkan bahwa sebaran e Warong KUBE PKH di Kota Bau-Bau dan Kota Kendari relatif merata. Penentuan lokasi e-warong tampaknya juga berkaitan dengan kuantitas jumlah kepeser-

taan warga miskin di kedua wilayah ini, baik yang terjaring dalam PKH maupun Penerima Bantuan Sosial Rastra (Beras Sejahtera). Semakin besar jumlah warga miskin penerima bantuan sosial di daerah tersebut, maka jumlah e-Warong yang dibentuk oleh warga miskin dan ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bau-Bau dan Kota Kendari juga bisa lebih dari satu e-Warong KUBE. Sehingga harapan bahwa keberadaan e-Warong yang tersebar merata tersebut dapat melayani ratusan warga miskin Penerima Bantuan Sosial atau Penerima Bantuan Pangan Non Tunai tersebut yang juga tersebar pada delapan kecamatan Kota Bau-Bau dan 10 wilayah kecamatan di Kota Kendari

a. Keorganisasian

Jika ditinjau dari aspek keorganisasian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua e-Warong KUBE PKH di Kota-Bau mampu solid dalam mengelola KUBE Jasa tersebut. Dari 10 e-Warong yang terlibat dalam proses identifikasi terdapat sekitar 7 (tujuh) e Warong yang tetap dikelola oleh 10 anggota yang aktif. Sedangkan 3 (tiga) e-Warong lainnya hanya tersisa masing-masing sekitar 5, 6, dan 7 anggota yang aktif. Hal tersebut tampak dalam tabel berikut:

Tabel 2. Keadaan kepengurusan e-Warong KUBE PKH di Kota Bau-Bau dan Kota Kendari

No	Nama KUBE	Mekanisme Pemilihan Kepengurusan	Peserta Aktif	Struktur Kepengurusan
1	Kalampa	Musyawarah dengan melibatkan Penyelia	10 Orang	Ketua (merangkap anggota, Bendahara (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota), Anggota
2	Wakaaka	Musyawarah dengan melibatkan Penyelia	10 Orang	Ketua (merangkap anggota, Bendahara (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota), Anggota
3	Flamboyan	Musyawarah dengan melibatkan	5 Orang	Ketua (merangkap anggota,

		Penyelia		Bendahara (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota), Anggota
4	Bakti Praja	Musyawarah dengan melibatkan Penyelia	6 Orang	Ketua (merangkap anggota, Bendahara (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota), Anggota
5	Wamose	Musyawarah dengan melibatkan Penyelia	10 Orang	Ketua (merangkap anggota, Bendahara (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota), Anggota
6	Harapan	Musyawarah dengan melibatkan Penyelia	10 Orang	Ketua (merangkap anggota, Bendahara (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota), Anggota
7	Makmur Berkah	Musyawarah dengan melibatkan Penyelia	10 Orang	Ketua (merangkap anggota, Bendahara (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota), Anggota
8	Tapanabatu	Musyawarah dengan melibatkan Penyelia	10 Orang	Ketua (merangkap anggota, Bendahara (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota), Anggota
9	Al-Ikhlas	Musyawarah dengan melibatkan Penyelia	10 Orang	Ketua (merangkap anggota, Bendahara (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota), Anggota
10	Labuantae	Musyawarah dengan melibatkan Penyelia	7 Orang	Ketua (merangkap anggota, Bendahara (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota), Anggota

Sumber: Diolah dari data primer,

Berdasarkan data di dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 10 e-Warong KUBE PKH, hanya terdapat sekitar 7 e-Warong KUBE PKH yang memiliki anggota aktif lengkap sebanyak 10 orang sebagaimana yang disyaratkan oleh Permensos Nomor 25 tahun 2016 pasal 10 ayat 1. Sejatinya Dinas Sosial Kota Bau-Bau juga mensyaratkan hal tersebut. Namun dalam perjalanan hingga tahun 2017 3 e-Warong di kota ini tidak lagi memiliki personil pengelola yang lengkap. Penyebabnya dikarenakan adanya komunikasi dan koordinasi yang tidak berjalan dengan baik di antara pengelola e-Warong itu sendiri. Sehingga ada beberapa individu anggota pada ketiga e-Warong tersebut memilih untuk tidak lagi terlibat secara aktif dalam pengelolaan e-Warong KUBE PKH.

Selanjutnya aspek keorganisasian yang juga patut mendapat sorotan adalah proses pemilihan kepengurusan dilakukan secara musyawarah, sehingga individu pengelola yang menjadi ketua, sekretaris, bendahara dipilih secara bersama-sama dan mufakat. Kegiatan tersebut juga diikuti dan didampingi oleh seorang penyelia atau supervisor. Selain itu, dari sepuluh e-Warong KUBE PKH yang terlibat secara aktif dalam proses pengumpulan data, juga memiliki kelengkapan struktur kelembagaan e-Warong KUBE yang lengkap sesuai dengan amanah Permensos Nomor 25 Tahun 2016, yakni terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketiganya juga merangkap sebagai anggota, serta 7 anggota lainnya. Dengan demikian, total kepengurusan e-Warong KUBE PKH terdiri dari 10 orang yang semuanya berjenis kelamin perempuan.

Sementara itu, secara keorganisasian, e-warong KUBE PKH di Kota Kendari relatif lebih lengkap. Dari 13 e-warong yang telah terbentuk di Kota Kendari semua e-Warong masih memiliki personil yang lengkap dengan struktur yang terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.

b. Fungsi e-Warong KUBE PKH

Idealnya, e-Warong KUBE PKH memiliki beberapa fungsi, sesuai dengan amanah Permensos Nomor 25 tahun 2016 pasal 3, yakni sebagai tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga, agen bank penyalur bantuan sosial nontunai, tempat pemasaran hasil produksi KUBE, dan/atau; tempat layanan koperasi simpan pinjam.

Namun demikian, dari keempat fungsi tersebut, hanya fungsi sebagai tempat menjual pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga yang dapat dijalankan. Sebagian besar e-Warong malah tidak memenuhi syarat “berkualitas” sebagaimana yang disyaratkan dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2016. Sedangkan ketiga fungsi lainnya belum dapat dijalankan sama sekali. Hal tersebut sebagaimana ditampilkan dalam data berikut:

Tabel 3. Keadaan e-Warong KUBE PKH berdasarkan fungsinya di Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Fungsi KUBE	Frekuensi	%
1	Tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga	25	100
2	Agen bank penyalur bantuan sosial non tunai	12	48
3	Tempat pemasaran hasil produksi KUBE	1	4
4	Tempat layanan koperasi simpan pinjam	-	
5	Fungsi lainnya	12	48
Jumlah (Kota Kendari dan Kota Bau-Bau)		25	

Sumber: Data primer, 2017

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa fungsi utama yang baru dapat dilaksanakan oleh E-Warong KUBE di Sulawesi Tenggara adalah sebagai tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga. Pada fungsi ini, e-Warong menyediakan kebutuhan usaha dan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah bagi anggota KUBE, Rastra dan peserta PKH. Sehingga keberadaan e-Warong dapat menyediakan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM. Selain itu, juga akan memberikan lebih

banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Jenis bahan pokok yang tersedia di e-Warong di kota Bau-Bau relative bervariasi. 12 unit e-Warong Kube PKH di Kota Bau-Bau, telah mampu menyediakan beberapa jenis pangan utama meskipun dalam jumlah yang terbatas, seperti beras berkualitas, tepung, gula pasir, dan minyak goreng dari berbagai merek. Namun demikian, jika dibandingkan dengan besarnya harapan yang disandarkan pada e-Warong KUBE PKH yang seharusnya dianggap mampu melayani 500-1000 KPM, maka tentu saja jumlah jenis pangan yang disediakan di e-Warong KUBE PKH di daerah ini masih sangat jauh dari harapan. Pangan beras misalnya, semua e-Warong hanya menyiapkan 1 karung beras ukuran 60 Kg. Sementara itu, minyak goreng, telur, tepung dan gula pasir relatif tersedia dalam jumlah yang cukup pada sebagian besar e-Warong di Kota Bau-Bau. Kendati beberapa jenis pangan utama telah tersedia di e-Warong KUBE PKH dan kualitasnya cukup baik, namun dilihat dari sisi kuantitas masih terbatas dan perlu dilakukan penambahan jenis dan variasi jenis pangan yang dapat disediakan oleh e-Warong.

Selain jenis pangan utama sebagaimana yang disebutkan di atas, e-Warong justru lebih banyak menjual beberapa produk minuman dan makanan *instan* (cepat saji) yang juga banyak dijual di kios-atau warung-warung konvensional di Kota Bau-Bau. Pertimbangan utama mereka menjual produk-produk tersebut adalah, karena mudah terjual dan banyak dicari oleh masyarakat umum yang datang berbelanja di e-Warong. Kendati demikian, pengelola e-Warong umumnya tidak mempertimbangkan aspek kesehatan jika masyarakat khususnya anak-anak mengonsumsi produk instan tersebut secara berlebihan dan terus menerus.

Jenis produk minuman instan (warna orange) ini menjadi salah satu produk yang dijual di e-warong. Produk seperti ini ba-

nyak diminati oleh anak-anak. Tentu saja harus dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai jenis pangan apa saja yang dapat disediakan oleh pengelola e-warong, sehingga jenis pangan yang disediakan tidak hanya diminati oleh konsumen, tetapi juga memenuhi unsur kesehatan

Jenis pangan instan lainnya yang juga kerap disediakan oleh e-Warong adalah mi instan, beberapa jenis minuman berkarbonasi, minuman siap saji, dan camilan. Produk tersebut menurut pengakuan pengelola e-Warong juga banyak dicari oleh konsumen non KPM (masyarakat umum), sehingga selalu disediakan di e-Warong KUBE PKH di Kota Bau-Bau. Minuman dingin beraneka ragam warna juga sangat disukai oleh anak-anak, sehingga disediakan oleh pengelola e-Warong. Semua e-Warong KUBE PKH di Kota Bau-Bau belum memanfaatkan lemari pendingin untuk menyimpan produk makanan berkualitas yang sangat dibutuhkan oleh KPM dan masyarakat umum. Umumnya pangan yang disimpan dalam lemari es, adalah jenis pangan siap saji (instan).

Kondisi yang hampir sama juga ditemukan pada 13 unit e-Warong KUBE PKH di Kota Kendari. Dari 13 e-Warong diambil 5 sampel e-Warong yang dianggap mewakili kondisi e-Warong di Kota Kendari. Beberapa diantaranya adalah e-Warong Wekoila, e-Warong Barakati, e-Warong Tunas Mandiri, e-Warong Sejahtera Bersama, dan e-Warong Barakati Sejahtera I.

Kondisi e-Warong KUBE di Kota Kendari yang paling awal ingin diulas oleh peneliti adalah pada aspek jenis pangan yang disediakan oleh e-Warong Wekoila di Kota Kendari. Pada e-Warong ini, tidak ditemukan adanya jenis pangan beras. Jenis pangan lainnya seperti tepung, gula pasir, dan telur juga hanya tersedia dalam jumlah satuan. Selain itu, ada pula jenis produk makanan dan minuman siap/cepat saji yang juga banyak ditemukan di kios atau warung konvensional. Sedangkan, jenis pangan

yang disediakan di e-Warong KUBE PKH Barakati relatif lebih lengkap dibandingkan dengan e-Warong sebelumnya, antara lain beras berkualitas (ukuran 60 Kg dan 10 Kg), tepung, telur, gula pasir, minyak goreng serta bawang merah dan putih. Beberapa produk pangan telah dikemas dalam ukuran eceran. E-Warong ini juga menjual beberapa produk pangan siap saji atau cepat saji.

Kondisi jenis pangan yang disediakan oleh pengelola e-Warong Tunas Mandiri lebih sedikit dibandingkan dengan e-Warong sebelumnya. Jenis pangan yang mampu disediakan oleh e-Warong ini hanya tepung, telur, gula pasir, minyak goreng serta air bersih isi ulang dalam kemasan galon dan beberapa produk siap/cepat saji lainnya. Semuanya dalam jumlah yang sedikit. Di e-Warong ini bahkan tidak tersedia jenis pangan beras sebagai pangan utama yang sangat dibutuhkan oleh KPM.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga ditemukan pada e-Warong KUBE Sejahtera Bersama. Pada e-Warong ini hampir tidak ditemukan adanya produk pangan utama seperti beras, gula pasir, telur. Tepung terigu juga hanya tersedia dalam jumlah yang sangat sedikit (4 bungkus). Produk pangan yang disediakan adalah makanan dan minuman siap/cepat saji yang dipajang dalam lemari etalase.

Diantara semua e-Warong KUBE PKH di Kota Kendari, ada pula 1 unit e-Warong yang menyediakan produk pangan yang lebih baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Produk pangan utama seperti beras berkualitas, tepung terigu, gula pasir, dan minyak goreng telah tersedia dalam jumlah yang banyak. Selain itu, e-Warong ini, juga menyediakan beberapa jenis alat tulis sederhana, dan makanan cepat saji. Semuanya ditata dengan baik di lemari etalase dan rak barang dengan rapi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi e-Warong sebagai tempat menjual pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok ru-

mah tangga belum dapat berjalan optimal. Ada beberapa penyebab yang ditemukan di lapangan, antara lain:

- 1) Di Kota Kendari, peran penyelia terlalu dominan, termasuk dalam penggunaan Dana Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU), yakni untuk perbaikan ruangan, pengadaan lemari etalase, dan rak tempat barang. Pada beberapa e-Warong aktivitas tersebut dilakukan oleh penyelia. Ada pula penggunaan dana BPSU yang dilakukan secara Bersama-sama oleh pengelola dan penyelia. Namun penyelia tidak memberikan bukti kwitansi pembelian atau pengadaan ketiga item barang tersebut kepada pengelola. Sehingga pengelola e-Warong tidak mengetahui berapa tepatnya dana yang digunakan untuk pengadaan sarana usaha tersebut.
- 2) Beberapa e-Warong di Kota Kendari belum melakukan pembelanjaan modal usaha yakni sebesar 25 % dari total dana Bantuan KUBE yang diberikan oleh Pemerintah.
- 3) Semua e-Warong di Kota Bau-Bau memasok barang atau jenis pangan dari *supplier* lain non bulog, sehingga harga yang diperoleh juga relatif lebih tinggi dibandingkan harga yang ditawarkan oleh Bulog.
- 4) 4 unit e-Warong yang dibentuk di bulan April 2017 belum beroperasi secara maksimal, karena baru sebatas membenahi sarana usaha, yakni pembenahan ruang e-Warong, pembelian lemari etalase, lemari pendingin dan rak serbaguna. Keempat unit e-Warong tersebut belum melakukan pembelanjaan dana modal usaha.
- 5) Lokasi e-Warong yang terletak di pemukiman yang relatif sepi penduduk juga menyulitkan pengelola untuk mendapatkan perhatian masyarakat secara langsung, karena aksesibilitas ke lokasi e-Warong agak jauh.

Tiga fungsi lainnya, yakni sebagai agen bank penyalur bantuan sosial non tu-

nai, tempat pemasaran hasil peoduksi KUBE dan tempat leyanana koperasi simpan pinjam, belum dapat dijalankan oleh e-Warong. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh e-Warong untuk dapat menerapkan ketiga layanan tersebut, antara lain:

Tabel 4. Hambatan yang dihadapi oleh e-Warong di Prov. Sulawesi Tenggara

Fungsi	Hambatan
Agen Bank Penyalur Bantuan sosial non tunai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Kota Bau-Bau, Bank BNI telah membekali 12 unit e-Warong dengan perangkat <i>Electronic Data Capture</i> (EDC), Namun belum dapat digunakan oleh pengelola untuk melayani pencairan dana bantuan sosial untuk KPM, karena di kota ini, penyaluran dana bansos dilakukan melalui Bank BRI. Pihak BRI Bau-Bau sendiri belum mendistribusikan Kartu untuk akses ke EDC BRI dan mencairkan dana bantuan sosial. 2. Bank BRI Kota Bau-Bau belum membekali e-Warong dengan perangkat EDC BRI, sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh KPM. KPM menolak menggunakan mesin EDC dari Bank lain (BNI, karena adanya biaya potongan sebesar Rp. 5000,- yang harus dibebankan kepada KPM itu sendiri. 3. Di Kota Kendari, KPM telah menerima KKS dari Bank BNI, namun belum dapat digunakan untuk memperoleh dana bantuan sosial secara non tunai di e-Warong, karena semua e-Warong belum memperoleh EDC yang seharusnya disediakan oleh Bank BNI.
Tempat Pemasaran hasil produksi KUBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada komunikasi dan koordinasi antara e-Warong sebagai KUBE Jasa, dengan KUBE produksi yang ada di sekitar e-Warong; 2. Belum ada standarisasi produk KUBE Produksi yang akan dipasarkan
Tempat layanan koperasi simpan pinjam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada koordinasi antara KMIS dengan pihak terkait serta e-Warong untuk pengaplikasian fungsi layanan koperasi simpan pinjam yang disediakan oleh e-Warong. 2. Belum ada koordinasi Dinas terkait, khususnya dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk pembinaan e-Warong agar mampu menyediakan layanan simpan pinjam.
Fungsi lainnya	<p><i>Fungsi sebagai agen bank</i></p> <p>Transaksi non bantuan sosial non tunai sedianya telah dapat dilaksanakan oleh e-Warong di Kota Bau-Bau, mengingat semua e-Warong di Kota ini telah dibekali EDC oleh bank BNI. Sehingga idealnya, e-Warong juga dapat berperan sebagai agen bank yang dapat menyediakan layanan bagi masyarakat umum dan KPM, seperti: pembayaran tagihan listrik/pulsa listrik, telepon/internet, pembelian pulsa dan sebagainya.</p> <p>Pembayaran serupa secara tunai tidak diterapkan oleh dilakukan diterapkan oleh e-Warong di Kota Bau-Bau, mengingat mereka tidak memiliki deposit pada rekening Bank BNI yang telah dimiliki oleh e-Warong.</p>

Pada akhir proses penelitian ini, telah ada perkembangan terbaru dari upaya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Bau-Bau dan Dinas Sosial Kota Kendari pada beberapa pihak yang terkait seperti Bank BNI dan Bank BRI. Koordinasi ini dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mempercepat penerapan fungsi e-Warong sebagai agen bank penyalur bantuan sosial baik PKH, Rastra, maupun BPNT lainnya. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, maka pihak Bank BNI Kota Bau-Bau telah melakukan pelatihan penggunaan EDC kepada semua pengelola e-Warong yang didampingi penyelia serta membekali masing-masing e-Warong dengan perangkat EDC (Mobile).

Namun demikian, sebagaimana telah dipaparkan dalam tabel di atas, bahwa perangkat tersebut pada akhirnya belum dapat difungsikan oleh pengelola e-Warong karena bantuan sosial tidak disalurkan melalui Bank BNI, tetapi melalui Bank BRI. Dengan demikian, KPM yang ingin menggunakan KKS dari Bank BRI untuk mencairkan bantuan non tunai melalui e-Warong harus menggunakan kartu tersebut pada perangkat EDC milik Bank BNI. Transaksi non tunai antar bank tersebut dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 5000,-. Hal tersebut mendapatkan penolakan dari KPM yang enggan uang dalam rekeningnya debet untuk biaya administrasi tersebut.

Layanan transaksi non tunai terhadap masyarakat umum telah dapat dilakukan, baik untuk melayani transaksi pembelian produk pangan atau barang lainnya yang disediakan oleh e-Warong, maupun untuk kepentingan pembayaran berbagai macam tagihan, seperti tagihan listrik/token listrik, telepon/internet, tagihan air PDAM dan lain sebagainya. Namun demikian, tampaknya layanan ini juga belum dimanfaatkan oleh masyarakat umum di Kota Bau-Bau, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan e-Warong di kota ini, serta ragam layanan transaksi non tunai yang disediakan.

Sementara itu, semua e-Warong di Kota Kendari belum dapat menerapkan layanan transaksi non tunai untuk masyarakat umum sekalipun, mengingat lambatnya progres pengurusan penyediaan perangkat EDC yang seharusnya dilakukan oleh Bank BNI sebagai satu-satunya bank mitra pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial. Sehingga semua transaksi dengan KPM dan masyarakat umum, masih dilakukan secara tunai.

c. Kriteria Pembentukan e-Warong

Permensos Nomor 25 Tahun 2017, mensyaratkan beberapa hal sebagai kriteria utama pembentukan e-Warong KUBE PKH di daerah. Beberapa kriteria tersebut, antara lain:

- a. Lokasi e-Warong terkoneksi dengan internet jaringan listrik;
- b. Mampu melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 KPM bantuan sosial;
- c. Menggunakan tempat/rumah pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE;
- d. Melaksanakan transaksi sosial non tunai.

Dari keempat kriteria tersebut, dua kriteria dianggap terpenuhi berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lokasi e-Warong yang dikelola oleh KPM itu sendiri. Semua e-Warong berada pada lokasi yang terkoneksi dengan jaringan internet dari operator seluler Telkomsel. Pada dasarnya sebagian besar e-Warong KUBE PKH baik di Kota Bau-Bau maupun Kota Kendari berada dalam area yang dapat dicover oleh jaringan internet fiber optik dan tembaga yang disediakan oleh PT. Telkom Cabang Kendari dan Kantor Cabang Bau-Bau. Namun demikian, belum ada satupun e-Warong yang memanfaatkan layanan internet yang disediakan oleh PT. Telkom tersebut.

Pilihan menggunakan layanan internet dari operator seluler juga lebih menguntungkan bagi e-Warong yang terletak dipinggiran Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang secara faktual belum dapat terjangkau oleh jaringan internet fiber Optik

dan kabel tembaga. Implikasi utama dari pilihan menggunakan layanan internet yang disediakan oleh operator seluler adalah bahwa pihak Bank mitra e-Warong (BNI dan BRI) hanya dapat membekali e-Warong dengan perangkat EDC Jenis GPRS Power dan GPRS Mobile. Mesin EDC berbasis GPRS power merupakan mesin yang menggunakan sinyal seperti perangkat seluler, tetapi sumber powernya menggunakan listrik dari PLN, sehingga harus selalu tersambung pada stop kontak PLN. Tipe jenis ini memang akan banyak dipergunakan pada e-Warong yang tidak mempunyai line telepon fixed line. Pilihan perangkat yang kedua, yakni EDC berbasis GPRS mobile, merupakan jenis mesin yang dapat dipakai dimana saja selama tersedia sinyal dari operator seluler tertentu. Sumber powernya menggunakan baterai yang dapat diisi ulang (*rechargable*). Kelebihan EDC ini dapat dibawa kemana-mana (port biasanya dipergunakan hanya untuk permanen). Sehingga akan sangat baik digunakan pada transaksi yang dilakukan di luar e-Warong KUBE PKH. Dari 25 e-Warong KUBE di Provinsi Sulawesi Tenggara, 12 diantaranya telah dibekali EDC dari Bank BNI, yakni 12 e-Warong yang terletak di Kota Bau-Bau.

Kriteria berikutnya yang juga telah terpenuhi adalah bahwa bahwa seluruh e-Warong memanfaatkan rumah tempat/rumah pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE. Sehingga pengelola e-Warong tidak perlu mengeluarkan dana untuk menyewa atau kontrak tempat yang akan dijadikan e-Warong KUBE PKH. Umumnya lokasi e-Warong KUBE PKH berada di rumah ketua kelompok. Namun demikian, wtidak semua lokasi e-Warong berada pada lokasi yang menguntungkan pengelolaan e-Warong, beberapa diantaranya malah berada pada lokasi berikut:

- a. Lokasi e-Warong terletak di tengah pemukiman yang agak sepi penduduk;

b. e-Warong berada di lokais yang tidak sehat (di depan e-Warong terdapat kumpulan lumpur yang relatif permanen

c. E-Warong berada di lokasi yang jauh dari jalan utama (khususnya e-Warong yang berada di Kota Kendari)

Kondisi tersebut di atas, relatif akan menyulitkan upaya pengembangan usaha yang seharusnya terus dilakukan oleh pengelola e-Warong di masa mendatang. Pada saat pembentukan e-Warong, sangat penting untuk memperhatikan perkara aksesibilitas KPM dan masyarakat umum ke lokasi e-Warong dengan menggunakan moda transportasi apa saja.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, terindikasi bahwa hanya segelintir e-Warong yang dapat melayani 500-1000 KPM baik di Kota Bau-Bau maupun KPM yang berdomisili di Kota Kendari. Hal tersebut tampak dari fakta di lapangan, bahwa hanya segelintir pula e-Warong yang telah menyediakan jenis pangan dalam jumlah yang sangat cukup untuk melayani lebih dari 500 KPM, termasuk masyarakat umum lainnya.

d. Penggunaan Alat *Electronic Data Capture* (Alat Gesek Transaksi Non Tunai)

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya, bahwa dari 25 e-Warong KUBE PKH di Sulawesi Tenggara, baru sekitar 12 e-Warong yang telah menggunakan EDC. Meskipun belum dimanfaatkan untuk keperluan transaksi non tunai. Pihak Bank BNI juga telah memberikan pelatihan terhadap semua pengelola e-Warong yang didampingi oleh penyelia. Hingga saat ini, pihak Dinas Sosial Kota Bau-Bau masih terus berkoordinasi dengan pihak Bank BRI agar Lembaga perbankan tersebut secepatnya merealisasikan kewajibannya menyediakan perangkat EDC dan bantuan teknis berupa pelatihan kepada pengelola e-Warong KUBE PKH di kota ini.

13 e-Warong KUBE PKH di Kota Kendari belum dibekali perangkat EDC oleh Bank BNI selaku Bank Mitra penyalur Dana Bantuan Sosial di Kota Kendari. Kendati demikian, saat ini proses koordinasi dan pengurusan penyelesaian kewajiban dari Lembaga perbankan ini sedang berlangsung. Sehingga dalam waktu yang tidak akan lama lagi, semua e-Warong di Kota Kendari dan Kota Bau-Bau akan dibekali perangkat tersebut. Perangkat EDC diharapkan akan membantu e-Warong menjalankan fungsi mereka sebagai penyalur dana bantuan sosial bagi KPM secara non tunai di masa mendatang.

e. Keanggotaan e-Warong KUBE PKH di Sulawesi Tenggara

Aspek keanggotaan dapat ditinjau dari beberapa hal, antara lain: kepesertaan, domisili, usia, serta potensi dan keterampilan yang dimiliki. Jika keempat aspek tersebut diterapkan untuk mengkaji keanggotaan pengelolaan e-Warong KUBE PKH, maka akan tampak profil e-Warong KUBE PKH sebagai berikut:

- 1) Seluruh anggota e-Warong merupakan peserta PKH atau Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial yang memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS);
- 2) Masing-masing anggota e-Warong KUBE PKH berdomisili di wilayah kelurahan/kecamatan yang sama dengan lokasi e-Warong itu sendiri.
- 3) Semua anggota e-Warong KUBE PKH telah menikah dan atau berusia 18 hingga 60 tahun ke atas dan masih produktif;
- 4) Dari 25 e-Warong di Sulawesi Tenggara, terdapat sekitar 20 e-Warong yang anggota-anggotanya memiliki keterampilan. Beberapa jenis keterampilan yang dimiliki oleh anggota-anggota e-Warong KUBE PKH di Kota Kendari, antara lain: keterampilan membuat kriya dari bahan daur ulang sampah, kue-kue kering dan basah, keripik; kerupuk, pengrajin bambu, mengelola catering dan pengoperasian fotocopy. Berdasarkan

hasil penelitian, menunjukkan bahwa semua jenis keterampilan tersebut belum dimanfaatkan sebagai potensi yang dapat dikembangkan oleh pengelola e-Warong KUBE PKH.

5) Jika dibandingkan dengan e-Warong KUBE PKH di Kota Kendari, maka e-Warong KUBE PKH memiliki anggota-anggota dengan keterampilan yang lebih beragam. Beberapa jenis keterampilan tersebut, antara lain:

- a) Membuat kue kering dan basah (semua KUBE);
- b) Beternak ayam kampung (1 unit KUBE);
- c) Membuat kain tenun tradisional (4 unit KUBE);
- d) Menjual ikan (1 unit KUBE);
- e) Menjahit (3 unit KUBE);
- f) Membuat kripik pisang/ketela tradisional (3 unit KUBE);
- g) Memasak untuk keperluan *catering* (3 unit KUBE);
- h) Membuat kriya bunga plastik dari bahan daur ulang (3 unit KUBE), dan
- i) Membuat roti (1 unit KUBE).

Semua jenis keterampilan belum dimanfaatkan oleh pengelola e-Warong menjadi potensi yang dapat dikembangkan dan memberi nilai tambah bagi e-Warong KUBE

f. Pemanfaatan Dana Bantuan Pengembangan Sarana Usaha dan Dana Bantuan KUBE

Salah satu yang menjadi sorotan dari penelitian ini adalah berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) dan Dana Bantuan KUBE. Besaran dana BPSU berjumlah Rp. 10.000.000,-. Semua e-Warong di Sulawesi Tenggara telah menerima dana. Dana tersebut telah dimanfaatkan dengan baik oleh pengelola e-Warong KUBE PKH di Kota Bau-Bau dengan didampingi oleh penyelia. Dana tersebut telah digunakan untuk keperluan pengembangan sarana usaha sebagaimana yang diamanatkan oleh Permensos Nomor 25 Tahun 2016, yakni untuk

keperluan perbaikan ruangan e-Warong, pengadaan lemari etalase, dan rak tempat barang.

E-Warong KUBE PKH di Kota Bau-Bau, juga telah menerima dana bantuan KUBE sebesar Rp. 20.000.000,-. Dana tersebut telah pula digunakan untuk modal usaha dan modal kerja. Penggunaan modal usaha sebesar 25 % dari total dana Bantuan KUBE tersebut, atau sekitar Rp. 5.000.000,- tersebut digunakan untuk membeli bahan pangan pokok, seperti: beras, gula pasir, tepung, Minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, dan bahan pangan lainnya. Sedangkan sisanya sebesar 75 % digunakan untuk modal kerja, yakni untuk keperluan keperluan pembayaran listrik, pembelian timbangan barang, mesin pengemas hampa udara, lemari pendingin, dan alat angkut berupa trolley. Meskipun demikian, hasil penelusuran di lapangan tampaknya pembelanjaan modal usaha sangat belum optimal khususnya penyediaan bahan pangan pokok yang memadai baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya yang seharusnya dapat melayani sekitar 500 – 1000 KPM di Kota Bau-Bau.

Kondisi yang relatif berbeda ditemukan di Kota Kendari. Secara administratif, semua e-Warong telah menerima dana BPSU dan dana Bantuan KUBE. Sebagian besar e-Warong telah menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki ruang e-Warong, pembelian lemari etalase dan rak tempat barang. Namun demikian, pada beberapa e-Warong, peran penyelia terlalu dominan khususnya pada aspek penggunaan dana tersebut. Dalam hal ini, penyelia turut serta dalam proses pembelian atau pengadaan lemari etalase dan dan rak tempat barang. Bahkan adapula 1 unit e-Warong yang tidak mengetahui rincian penggunaan dana BPSU, karena dana tersebut “dipegang” oleh penyelia. Dari penelusuran penelitian, ada beberapa kondisi yang ditemukan di lapangan, yakni:

- 1) Penggunaan dana BPSU dilakukan oleh penyelia. Penyelia berperan mengadakan

(membelikan) lemari etalase dan rak tempat barang, termasuk melakukan perbaikan ruangan e-Warong (1 unit e-Warong)

- 2) Pembelian dilakukan oleh pengelola dan penyelia. Tetapi tidak ada transparansi mengenai jumlah dana yang digunakan untuk melakukan renovasi ruangan, pembelian lemari etalase dan rak tempat barang;
- 3) Sebagian dan disimpan oleh penyelia. Dana yang telah diterima oleh pengelola selanjutnya digunakan untuk melakukan perbaikan ruangan e-Warong yang dilakukan sendiri oleh pengelola. Sedangkan sisa dana diserahkan kepada penyelia yang selanjutnya dijanjikan akan dibelikan lemari etalase dan rak tempat barang. Namun hingga penelitian ini dilakukan, lemari etalase dan rak tempat barang tersebut belum dapat disediakan oleh penyelia. Etalase yang digunakan saat ini adalah properti pribadi dan rak tempat barang dibuat sendiri dari bahan kayu dan bilah papan (1 unit e-Warong).
- 4) Semua dana BPSU disimpan oleh penyelia, dan tidak digunakan untuk perbaikan ruangan e-Warong serta tidak ada pembelian lemari etalase dan rak tempat barang (1 unit e-Warong).

Pada aspek penggunaan dana bantuan KUBE oleh e-Warong di Kota Kendari sebesar Rp. 20.000.000,- juga belum optimal. Sebagaimana yang ditemukan di Kota Bau-Bau, penggunaan dana Bantuan Sosial untuk modal usaha sebesar 25 % dari total dan bantuan sosial tersebut, tampaknya belum maksimal. Hal tersebut tampak dari kuantitas barang yang disediakan oleh e-Warong. Beberapa kondisi faktual yang ditemukan di lapangan, antara lain:

- 1) 4 unit e-Warong belum melakukan pembelian modal usaha yakni berupa pembelian bahan pangan pokok. Dana tersebut disimpan oleh penyelia.
- 2) 1 unit e-Warong melakukan pembelian sendiri menggunakan modal pengelola e-Warong itu sendiri, sedangkan

Dana bantuan modal usaha disimpan oleh penyelia.

Sementara itu, modal kerja telah digunakan sebagaimana mestinya pada 12 unit e-Warong, kecuali 1 unit e-Warong yang juga harus menggunakan perangkat milik sendiri dan bukan melalui pembelian menggunakan Dana Bantuan KUBE (modal kerja).

g. Supply (pasokan barang)

Salah satu mitra dari e-Warong KUBE PKH di Sulawesi Tenggara sebagaimana yang disyaratkan oleh perautran penrundang-undangan adalah Badan Urusan Logistik (Bulog). Institusi ini berperan menyediakan bahan pangan pokok dalam jumlah dan mutu yang terjamin.

Namun demikian, perkembangan terakhir pada akhir penelitian ini adalah bahwa koordinasi masih dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bau-Bau dan Dinas Sosial Kota Kendari. Di Kota Bau-Bau dan Kota Kendari, saat ini semua pengelola e-Warong sedang melakukan proses melengkapi berkas dokumen administrasi, sebagai syarat agar dapat memperoleh layanan pasokan bahan pangan pokok dari Bulog Kota Bau-Bau dan Kota Kendari.

Pasokan bahan pangan pokok yang disediakan oleh e-Warong saat ini umumnya diperoleh dari *supplier* non bulog, yakni dari toko-toko bahan pangan grosir yang banyak ditemukan di Kota Bau-Bau dan Kota Kendari. Harga yang diberikan juga relatif lebih tinggi dari harga bahan pangan pokok yang seharusnya disuplai oleh Bulog.

h. Jenis Kegiatan yang dilakukan e-Warong KUBE PKH

Permensos Nomor 25 Tahun 2016, mengamanahkan bahwa e-Warong KUBE PKH melakukan beberapa kegiatan utama, antara lain:

- 1) Melayani pencairan Bantuan Sosial Non Tunai;
- 2) Melayani penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima Bantuan Sosial;

- 3) Melayani pembayaran tagihan telepon, listrik, dan air bagi penerima Bantuan Sosial dan masyarakat umum;
- 4) Memasarkan hasil produksi KUBE;
- 5) Menjadi agen bank yang bekerja sama dalam penyaluran Bantuan Sosial non tunai
- 6) Melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan adanya keadaan yang berbeda antara kegiatan utama yang telah dapat dilakukan oleh e-Warong di Kota Bau-Bau dengan e-Warong di Kota Kendari. Di Kota Bau-Bau, hampir semua layanan telah dapat dilakukan oleh e-Warong, kecuali pemasaran hasil KUBE Produksi. Sedangkan di Kota Kendari hanya satu kegiatan yang dapat dilakukan, yakni melayani penjualan bahan pokok murah bagi penerima Bantuan Sosial dalam bentuk tunai. Dengan merujuk pada panduan di atas, dapat diketahui kondisi e-Warong di Provinsi Sulawesi Tenggara, tampak dalam uraian dibawah ini:

- 1) E-Warong KUBE PKH telah dapat melayani pencairan dana bantuan sosial secara non tunai. Hal ini disebabkan karena e-Warong di kota ini telah dibekali dengan perangkat EDC dari Bank BNI. Namun demikian, KPM yang akan memanfaatkan layanan tersebut menggunakan KKS yang dikeluarkan oleh Bank BRI, maka akan merelakan uang sebesar Rp. 5000,- didebet oleh pihak Bank BNI melalui rekening KPM. Biaya potongan tersebut merupakan biaya administrasi yang lazim dibabankan kepada nasabah yang menggunakan perangkat EDC lintas bank Oleh karena itu, KPM di Kota Bau-Bau cenderung menolak menggunakan perangkat EDC dari bank BNI tersebut dan memilih menunggu datangnya perangkat EDC dari bank BRI.
- 2) 12 unit E-Warong di Kota Bau-Bau telah dapat menjalankan kegiatan transaksi non tunai baik oleh KPM maupun masyarakat umum, baik untuk kepentingan

berbelanja bahan pangan pokok, maupun untuk untuk memnayar beragam rupa tagihan, seperti listrik/token listrik, air PDAM, dan lain sebagainya.

- 3) Belum semua e-Warong KUBE PKH di Sultra melakukan pengemasan ulang produk pangan yang mereka sediakan, kendati mereka telah memiliki mesin pengemas ulang dan telah pula menyediakan plastik pengemas ulang;
- 4) Sekitar 18unit e-Warong KUBE PKH telah mampu melakukan penjualan bahan pokok murah bagi KPM baik dalam bentuk tunai maupun non tunai. Sedangkan Sebanyak 6 unit e-Warong lainnya belum melakukan pembelanjaan dana Bantuan Modal Usaha.
- 5) Hanya 1 e-Warong KUBE PKH yang melaksanakan kegiatan penjualan hasil produk KUBE Produksi. Dalam hal ini, e-Warong berperan sebagai agen pemasaran.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, bahwa berdasarkan hasil penelitian, terdapat 25 unit e-Warong KUBE PKH yang telah dibentuk di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017, yang terdiri dari 13 unit e-Warong KUBE PKH di Kota Kendari dan 12 unit e-Warong KUBE PKH di Kota Bau-Bau. Selanjutnya profil e-Warong KUBE PKH di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

1. Ditinjau dari aspek keorganisasian, tidak semua e-Warong mampu solid hingga saat ini, dari sekitar 25 unit e-Warong yang berhasil dibentuk, tiga KUBE diantaranya tidak lagi memiliki anggota yang lengkap (10 orang) masing-masing KUBE jasa tersebut hanya dikelola oleh 5, 6 dan 7 anggota aktif. Kendati demikian, proses pemilihan penentuan struktur kepengurusan KUBE Jasa dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan

- penyelia, sehingga tetap memiliki struktur yang lengkap yakni ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
2. Jika ditinjau dari aspek fungsi e-Warong KUBE PKH sebagaimana yang diamanahtakan oleh Permensos Nomor 25 Tahun 2016, sebanyak 25 unit e-Warong KUBE PKH di Sultra telah dapat berfungsi sebagai tempat menjual bahan pangan murah dan berkualitas serta kebutuhan pokok rumah tangga lainnya. Selain itu, 12 unit e-Warong di Kota Bau-bau telah dapat berfungsi sebagai agen bank penyalur bantuan sosial non tunai dan telah dapat pula menjalankan kegiatan lainnya, yakni sebagai agen bank dengan fungsi lainnya. Hanya 1 unit e-Warong yang juga memasarkan hasil produksi KUBE dan belum ada e-Warong yang berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam.
 3. E-Warong KUBE PKH di Sulawesi Tenggara telah memenuhi beberapa kriteria pembentukan e-Warong sebagaimana yang ditetapkan dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2016, yakni bahwa semua lokasi e-Warong terkoneksi dengan jaringan internet yang disediakan oleh operator seluler. Ketersediaan jaringan internet *fiber optic* dan kabel tembaga hanya mampu menjangkau daerah perkotaan sana sebagian kecil di lokasi ping-giran kota. Selain itu, Semua e-Warong juga memanfaatkan rumah pengurus KUBE sebagai lokasi e-Warong berdasarkan kesepakatan para anggota.
 4. Penggunaan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) hanya dapat dilakukan oleh 12 e-Warong KUBE PKH di Kota Bau-Bau, yakni EDC dari Bank BNI. Proses penyelesaian tanggung jawab bank mitra untuk menyediakan perangkat tersebut masih dalam proses pengurusan dan koordinasi antara pihak Dinas Sosial Kota Bau-Bau dengan pihak BRI Cabang Bau-Bau serta antara Dinas sosial Kota Kendari dengan Pihak Bank BNI Cabang Kendari
 5. Dilihat dari sisi keanggotaan e-Warong, maka profil e-Warong KUBE PKH di Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:
 - a) Seluruh anggota e-Warong merupakan peserta PKH atau Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial yang memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS);
 - b) Masing-masing anggota e-Warong KUBE PKH berdomisili di wilayah kelurahan/kecamatan yang sama dengan lokasi e-Warong itu sendiri.
 - c) Semua anggota e-Warong KUBE PKH telah menikah dan atau berusia 18 hingga 60 tahun ke atas dan masih produktif;
 - d) Dari 25 e-Warong di sulawesi Tenggara, terdapat sekitar 20 e-Warong yang anggota-anggotanya memiliki keterampilan. Beberapa jenis keterampilan yang dimiliki oleh anggota-anggota e-Warong KUBE PKH di Kota Kendari, antara lain: keterampilan membuat kriya dari bahan daur ulang sampah, kue-kue kering dan basah, keripik; kerupuk, pengrajin bambu, mengelola catering dan pengoperasian fotocopy. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa semua jenis keterampilan tersebut belum dimanfaatkan sebagai potensi yang dapat dikembangkan oleh pengelola e-Warong KUBE PKH.
 - e) Jika dibandingkan dengan e-Warong KUBE PKH di Kota Kendari, maka e-Warong KUBE PKH memiliki anggota-anggota dengan keterampilan yang lebih beragam.
 6. Penggunaan dana BPSU dan dana Bantuan KUBE oleh e-Warong KUBE PKH di Kota Kendari dan Kota Bau-Bau menunjukkan kondisi berbeda. Dana tersebut telah dimanfaatkan dengan baik oleh pengelola e-Warong KUBE PKH di Kota Bau-Bau dengan didampingi oleh penyelia. Kondisi yang relatif berbeda ditemukan di Kota Kendari. Secara

- adminsitratif, semua e-Warong telah menerima dana BPSU dan dana Bantuan KUBE. Sebagian be-sar e-Warong telah menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki ruang e-Warong, pembelian lemari etalase dan rak tempat barang. Namun demikian, pada beberapa e-Warong, peran penye-lia terlalu dominan khususnya pada as-pek penggunaan dana tersebut.
7. Pada aspek penggunaan dana bantuan KUBE oleh e-Warong di Kota Kendari sebesar Rp. 20.000.000,- juga belum optimal. Sebagaimana yang ditemukan di Kota Bau-Bau, penggunaan dana Bantuan Sosial untuk modal usaha sebesar 25 % dari total dan bantuan sosial tersebut, tampaknya belum maksimal. Hal tersebut tampak dari kuantitas barang yang disediakan oleh e-Warong.
 8. Pasokan bahan pangan pokok yang disediakan oleh e-Warong saat ini umumnya mereka peroleh dari *supplier* non bulog, yakni dari toko-toko bahan pangan grosir yang banyak ditemukan di Kota Bau-Bau dan Kota Kendari. Harga yang diberikan juga relatif lebih tinggi dari harga bahan pangan pokok yang seharusnya disuplai oleh Bulog.
 9. Jenis kegiatan yang telah dapat dilakukan oleh e-Warong KUBE PKH, antara lain:
 - a. 12 unit E-Warong KUBE PKH di Kota Bau-Bau, telah dapat melayani pencairan dana bantuan sosial secara non tunai. Hal ini disebabkan karena e-Warong di kota ini telah dibekali dengan perangkat EDC dari Bank BNI. Namun demikian, KPM yang akan memanfaatkan layanan tersebut menggunakan KKS yang didistribusikan oleh Bank BRI, maka akan merelakan uang sebesar Rp. 5000,- didebet oleh pihak Bank BNI melalui rekening KPM. Oleh karena itu, KPM di Kota Bau-Bau cenderung menolak menggunakan perangkat EDC dari bank BNI tersebut dan memilih menunggu datangnya perangkat EDC dari bank BRI.
 - b. 12 unit E-Warong di Kota Bau-Bau telah dapat menjalankan kegiatan transaksi non tunai baik oleh KPM maupun masyarakat umum, baik untuk kepentingan berbelanja bahan pangan pokok, maupun untuk untuk memnayar beragam rupa tagihan, seperti listrik/token listrik , air PDAM, dan lain sebagainya.
 - c. Belum semua e-Warong KUBE PKH di Sultra melakukan pengemasan ulang produk pangan yang mereka sediakan, kendati mereka telah memiliki mesin pengemas ulang dan telah pula menyediakan plastik pengemas ulang;
 - d. Sekitar 18 unit e-Warong KUBE PKH telah mampu melakukan penjualan bahan pokok murah bagi KPM baik dalam bentuk tunai maupun non tunai. Sedangkan Sebanyak 6 unit e-Warong lainnya belum melakukan pembelanjaan dana Bantuan Modal Usaha.
 - e. Hanya 1 e-Warong KUBE PKH yang melaksanakan kegiatan penjualan hasil produk KUBE Produksi. Dalam hal ini, e-Warong berperan sebagai agen pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Patricia A dan Adler, Peter. 2009. *Teknik-teknik Observasi, Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- BPK. 2013. Efektifitas Program Keluarga Harapan (dalam jaringan) <<http://www.bpk.go.id/news/efektifitas-program-keluarga-harapan> (19 September 2017)>.
- Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kementerian Sosial. 2016. Elektronik Warung Gotong Royong Kube-PKH. Bahan presentasi pada pelatihan Peneliti Studi Kajian Awal Pelaksanaan Program e-Warong KUBE-PKH. Bogor, Oktober. Tidak dipublikasikan.
- Mawardi, M. Sulton, Ruhmaniyati, Tamyis, A.R, Usman, S, Kurniawan, A., Budiani. 2017. Kajian Awal Pelaksanaan

- Program *e-Warong Kube-PKH*. Jakarta. The SEMERU Research Institute bekerja sama engan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui *e-Warong KUBE PKH*
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui *e-Warong KUBE PKH*
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui *e-Warong KUBE PKH*
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.